

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya tentang Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Privatisasi BUMN Ditinjau dari Peranan IMF Antara Tahun 1967-1998. Maka peneliti menyimpulkan dari pembahasan penelitian dan mengemukakan saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

BUMN dalam pandangan konstitusi merupakan badan pemerintahan yang mengelola kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Kedudukan BUMN telah jelas posisinya dalam konstitusi sebagai aset yang dilindungi negara dan dikelola oleh negara.

Adapun BUMN dalam perspektif perekonomian memiliki peranan strategis, dimana peranannya sebagai pengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak, dari mulai keperluan barang pokok hingga kebutuhan jasa masyarakat. Perspektif ekonomi makro memandang BUMN memiliki pengaruh dalam aspek kepentingan fiskal, yaitu untuk menambah sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dalam pandangan ekonomi mikro sebagai salah satu alat produksi kebutuhan masyarakat.

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perjalanan BUMN pada masa Orde Baru melewati beberapa kondisi, salah satunya kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN dilegalkan melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) tahun 1968. Lahirnya UU PMA merupakan hasil dari konferensi di Jenewa tentang investasi asing di Indonesia yang diselenggarakan pada bulan November 1966. Konferensi ini dihadiri oleh para ekonom Indonesia yang disebut '*The Berkeley Mafia*' dan para kapitalis global yang memimpin perusahaan raksasa, seperti David Rockefeller, dan perusahaan dunia diwakili oleh *British Leyland*, *Lehman Brothers*, *Asian Development Bank* dan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, hal yang wajar apabila Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang disahkan 2 bulan setelah pertemuan ini memiliki karakteristik pro kepada para investor asing. Negeri Indonesia hanya mewadahi fasilitas investasi para pemodal.

Selain adanya UU PMA yang telah disahkan pada tanggal 10 Januari 1967, kebijakan privatisasi BUMN diamanatkan oleh IMF (*International Monetary Fund*), sebuah lembaga keuangan internasional yang salah satu tugasnya memberikan pinjaman dana kepada negara anggotanya beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya, salah satunya adalah privatisasi BUMN. Indonesia merupakan negara yang meminjam dana/berutang kepada IMF dalam rangka menanggulangi hiper inflasi tahun 1966.

Privatisasi sudah diusung oleh IMF dari tahun 1966, Soeharto menjalankan program stabilisasi yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Pada

masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, privatisasi BUMN mengalami fase yang berbeda-beda setiap dasawarsanya. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing. IMF juga tergabung dalam IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*), dimana IGGI (saat ini berubah menjadi CGI- *Consultative Group on Indonesia*) melakukan kontrol atas kebijakan ekonomi Rezim Soeharto.

Privatisasi BUMN era Orde Baru meningkat pada tahun 1990-an, hal ini disebabkan lahirnya Konsensus Washington (dirumuskan oleh lembaga yang bemarkas di Washington DC, IMF dan *World Bank*). Konsensus Washington adalah 10 kebijakan ekonomi bagi negara yang dilanda krisis, atau negara yang sedang berkembang. Akhirnya, negara anggota IMF diharuskan menerapkan 10 kebijakan ini, diantaranya privatisasi BUMN. BUMN yang telah diprivatisasi adalah PDAM, Pertamina, PLN, Tambang Batubara, PT Tambang Timah, Semen Gresik, Indosat, Krakatau Steel, dan BUMN lainnya.

Puncaknya, saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah kembali berutang kepada IMF untuk menstabilkan krisis keuangan tersebut, dan dampaknya Indonesia kembali kebijakannya dikendalikan oleh IMF. Ketergantungan Indonesia berutang kepada pihak asing membuat negeri ini tergadaikan perekonomiannya. IMF bisa dikatakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan investor. Setelah seakan pemerintah hanya fasilitator masuknya para pemodal asing untuk mengeksploitasi potensi kekayaan Indonesia, baik berupa barang maupun jasa.

Melunasi utang tidaklah mudah, bahkan seringkali pemerintah membayar utang dengan berutang lagi, efeknya adalah para kreditor menjadi leluasa untuk menyetir kebijakan pemerintah Indonesia, salah satunya kebijakan privatisasi. Privatisasi menurut peneliti sangat merugikan negara, karena pengelolaan usaha dilakukan oleh swasta dengan keuntungan untuk swasta, sehingga harga jual ditentukan oleh swasta. Privatisasi bisa mengakibatkan kehilangan kedaulatan ekonomi yang berujung pada lepasnya kedaulatan politik, karena politik praktis saat ini membutuhkan dana besar, dana itu didapatkan dari para pemodal yang konsekuensinya para wakil negara harus membuat kebijakan pro pemodal, itulah yang disebut politik-ekonomi kapitalis.

Berdasarkan tekanan IMF privatisasi BUMN dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Orde Baru telah melakukan privatisasi BUMN, namun masih dalam rambu-rambu pemerintah, sehingga tidak terlalu dibebaskan para investor untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Era Reformasi lebih bebas dalam membuka investasi, hingga bisa mencapai 100 persen. Orde Baru menurut peneliti adalah “Era Pembukaan Privatisasi”, karena rezim ini tidak menekankan privatisasi sebagai prioritas kebijakan ekonomi.

Peranan IMF dalam privatisasi BUMN di Indonesia selama Orde Baru menurut peneliti adalah sebagai berikut, *pertama* IMF meminjamkan dana kepada Indonesia tahun 1966 untuk mengatasi hiper inflasi. Pemerintah Indonesia menyetujui *Letter of Intent* (nota kesepakatan) dengan IMF, salah satunya privatisasi BUMN. *Kedua*, IMF menjadi penasehat keuangan Indonesia dan memberikan masukan dalam forum *Paris Club* yang diadakan oleh IGGI tahun

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1967. Masukannya berupa pinjaman dana kepada Indonesia dengan bersyarat, salah satunya liberalisasi perekonomian. *Ketiga*, IMF mengusung *Washington Consensus* untuk Indonesia pada tahun 1989, yaitu 10 kebijakan ekonomi untuk negara berkembang, salah satu poin kebijakannya adalah privatisasi. *Keempat*, tahun 1997 Indonesia mengalami kondisi perekonomian yang ambruk akibat krisis Asia Tenggara. Indonesia didatangi IMF untuk meminjamkan dana guna mengatasi krisis. Dalam pinjaman dana ini IMF mensyaratkan 50 kesepakatan kebijakan ekonomi yang merugikan Indonesia, salah satunya privatisasi BUMN. IMF menempati posisi paling berpengaruh dalam kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia pada masa Orde Baru.

Peneliti memandang bahwa Indonesia memiliki sejarah perekonomian yang dipengaruhi oleh IMF dalam privatisasi BUMN dan menjadi ketergantungan kepada bantuan dana asing. Oleh karena itu peristiwa ini bisa dijadikan catatan sejarah untuk masa depan Indonesia agar lebih baik dalam pengelolaan BUMN dan mengkaji ulang untuk kebijakan meminta bantuan lembaga keuangan internasional.

Penelitian dengan judul *Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF Antara Tahun 1967-1998)* ini bisa dipelajari pada pendidikan formal. Penelitian ini sangatlah erat kaitannya dengan pembelajaran siswa di sekolah. Materi ini dapat dipelajari pada mata pelajaran sejarah di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII Semester I. Terdapat pada Standar Kompetensi 2, yaitu Menganalisis Perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi, dalam Kompetensi Dasar 1. Menganalisis

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perkembangan Pemerintah Orde Baru dan Kompetensi Dasar 2. Menganalisis Proses Berakhirnya Pemerintah Orde Baru dan Terjadinya Reformasi. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi rujukan para guru dan siswa sekolah dalam memahami mata pelajaran sejarah, khususnya pada masa Orde Baru dari perspektif perekonomian.

5.2 Saran

Peneliti ingin menyampaikan saran kepada mereka yang mendalami sejarah ekonomi dan Orde Baru, pemerintah dan pada umumnya bagi para pembaca. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi para sejarawan, sebagai kaum intelektual tentunya memiliki kemampuan dalam meneliti peristiwa sejarah. Sehingga diharapkan dapat melakukan penelitian untuk meningkatkan kemajuan negeri, dengan jalan mempelajari sejarah untuk dijadikan cerminan masa kini dan yang akan datang, agar sebagai anak bangsa meninggalkan sejarah kelam dan menggantinya dengan peristiwa yang mengukir nama baik negeri. Untuk penelitian selanjutnya, bisa diteliti mengenai privatisasi BUMN pada masa Reformasi.
2. Bagi pemerintah, harapan peneliti adalah pemerintah menasionalisasi BUMN, mengelolanya dengan manajemen yang profesional untuk kemakmuran rakyat dan tidak menyerahkannya kepada pihak swasta. Selain itu, kembali mengkaji mengenai kebijakan privatisasi yang merugikan masyarakat dan negara. Adapun mengenai kerjasama Indonesia

dengan lembaga asing dalam hal pinjaman dana perlu ditinjau ulang, karena telah terbukti apabila lembaga asing meminjamkan dananya kepada negara lain dalam hal ini IMF dengan Indonesia, maka yang terjadi adalah Indonesia dikendalikan oleh lembaga atau negara tersebut dalam hal kebijakan ekonomi dan politik.

3. Bagi pembaca umum, sebagai masyarakat umum tentunya menginginkan negerinya menjadi negeri yang terdepan, kuat dan mandiri. Tidak bergantung dan dikendalikan asing atau pihak swasta, salah satunya IMF. Sebagai masyarakat Indonesia yang mengalami masa Orde Baru, tentunya menjadi sebuah keharusan untuk memperbaiki kondisi negeri, dengan cara memunculkan paradigma baru bahwa negeri ini harus bangkit dari ketergantungan asing, dan mandiri serta profesional dalam mengelola BUMN melalui peningkatan *skill* dan pendidikan profesi.